MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS PERAN PAJAK KARBON, INTENSITAS ASET TETAP, *GREEN ECONOMY*, AND TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENINGKATAN *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)*

Nabila Assyifa[1], Nera Marinda Machdar[2]
Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
Email: 202310315075@mhs.ubharajaya.ac.id[1] , nera.marinda.machdar@dsn.ubharajaya.ac.id[2]

Abstract

Using corporate governance as a moderating variable, this study investigates how carbon taxes, fixed asset intensity, and the green economy affect the improvement of Environmental, Social, and Governance (ESG) performance. This study employs a descriptive qualitative approach to analyze documents such as sustainability reports, annual reports, and publications on carbon tax policies and the green economy. The study finds that carbon taxes encourage businesses to adopt low-emission technologies. The amount of assets owned by a company influences how responsible and environmentally friendly their asset management is. Furthermore, it has been shown that the green economy enhances ESG performance through resource efficiency and the use of clean technologies. This relationship is regulated by corporate management by ensuring transparency, accountability, and successful implementation of sustainability policies. Overall, this study emphasizes that in order to improve a company's ESG performance, fiscal policies, asset management, and green economy strategies must work together.

Keywords: Carbon Tax, Fixed Asset Intensity, Green Economy, Environmental, Social, and Governance (ESG), Corporate Governance

Abstrak

Dengan menggunakan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi, penelitian ini meneliti bagaimana pajak karbon, intensitas aset tetap, dan ekonomi hijau memengaruhi peningkatan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dokumen seperti laporan keberlanjutan, laporan tahunan, dan publikasi tentang kebijakan pajak karbon dan ekonomi hijau. Penelitian ini menemukan bahwa pajak karbon mendorong bisnis untuk mengadopsi teknologi dengan emisi rendah. Jumlah aset yang dimiliki perusahaan memengaruhi seberapa bertanggung jawab dan ramah lingkungan pengelolaan aset mereka. Selain itu, telah terbukti bahwa ekonomi hijau meningkatkan kinerja *Environmental, Social, and Governance (ESG)* melalui efisiensi sumber daya dan penggunaan teknologi bersih. Hubungan ini diatur oleh

Article history
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80
Prefix DOI :
10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

manajemen perusahaan dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan penerapan kebijakan keberlanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kinerja *Environmental, Social, and Governance (ESG)* perusahaan, kebijakan fiskal, pengelolaan aset, dan strategi ekonomi hijau harus bekerja sama.
Kata Kunci : Pajak Karbon, Intensitas Aset Tetap, *Green Economy*, *Environmental, Social, and Governance (ESG),* Tata Kelola Perusahaan

LATAR BELAKANG

Dalam menganalisis variabel dapat dilakukan penelitian pada literatur riview, masalah keberlanjutan semakin menjadi perhatian utama, terutama karena kontribusi industri ini terhadap emisi pajak karbon yang signifikan. Akibatnya, *Environmental, Social, and Governance (ESG)* muncul sebagai indikator penting untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dimensai *Environmental, Social, and Governance (ESG)* tidak hanya mencerminkan komitmen perusahaan terhadap etika bisnis, tetapi juga menjadi penentu daya tarik perusahaan untuk melakukan apa yang mereka lakukan.

Pajak karbon diterapkan secara konsisten pada tahun 2025, penerimaan dapat mencapai Rp23,65 triliun. Namun, komunikasi dan penyesuaian yang lebih baik diperlukan untuk kebijakan ini (Sitinjak, 2025). Selain pajak karbon, faktor internal perusahaan seperti tingkat aset tetap juga memengaruhi kemampuan bisnis untuk menerapkan teknologi hijau dan meningkatkan kinerja keberlanjutannya. Untuk mempertahankan legitimasi dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, perusahaan energi yang memiliki aset fisik yang signifikan harus berinvestasi dalam pembangkit ramah lingkungan, sistem pengelolaan limbah, dan peralatan hemat energi.

Untuk mendukung keberlanjutan, ekonomi hijau juga sangat penting. Menurut (T, 2024) *green economy* meningkatkan kinerja *Environmental, Social, and Governance (ESG* melalui penerapan teknologi bersih, efisiensi energi, dan instrumen keuangan berkelanjutan seperti laporan keberlanjutan dan bon hijau. Selain itu, *corporate governance* sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana hijau, pelaporan keberlanjutan, dan pajak karbon dilakukan secara akuntabel dan transparan. *Governance* yang kuat telah terbukti meningkatkan kebijakan lingkungan dan meningkatkan nilai perusahaan (Tabun dan Machdar, 2025).

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa kinerja *Environmental, Social, and Governance (ESG* yang terikat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait: pajak karbon, intensitas aset tetap, ekonomi hijau, dan tata kelola perusahaan. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk upaya Indonesia untuk mencapai transisi energi dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini juga penting untuk menjaga perusahaan energi kompetitif di tengah tuntutan praktik bisnis yang bertanggung jawab di seluruh dunia

KAJIAN TEORITIS

Teori *Stakeholder*

Perusahaan harus memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yang termasuk pemerintah, investor, masyarakat, dan lingkungan. Menurut studinya tentang green economy dan pelaksanaan pajak karbon, harapan masyarakat terhadap praktik keberlanjutan mendorong bisnis untuk menerapkan kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Dalam konteks ini, pihak berwenang mendorong perusahaan untuk mematuhi kebijakan pengurangan emisi dan mempertahankan reputasi keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan eksternal dari pemangku kepentingan memengaruhi praktik pengungkapan *Environmental, Social, and*

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Governance (ESG) serta rencana bisnis untuk mengoptimalkan kontribusi mereka pada green economy.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa prinsip stakeholder tercermin dalam kinerja keberlanjutan perusahaan energi (Putri *et al*., 2025) karena kegiatan operasional mereka memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Jadi, pentingnya *Environmental, Social, and Governance (ESG)* sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap dampak operasinya didasarkan pada teori pemangku kepentingan.

Teori *Legistimasi*

Teori legitimasi mengatakan bahwa keberlangsungan bisnis sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk mempertahankan legitimasi melalui kesesuaian nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat (T, 2024). Dalam hal pajak karbon dan transisi menuju *green economy*, legitimasi sangat penting karena perusahaan yang tidak menurunkan emisi karbonnya atau tidak transparan dalam laporan keberlanjutannya akan menghadapi tekanan untuk melakukan hal lain. Suatu penelitian mendefinisikan penerapan *green economy* pada perusahaan sebagai upaya untuk memperoleh legitimasi melalui praktik bisnis yang berfokus pada keberlanjutan (Lolo et al, 2022). Karena aktivitas mereka berpotensi memiliki dampak lingkungan yang signifikan, perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar cenderung memiliki tuntutan legitimasi yang lebih tinggi. Legitimasi kemudian mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab publik dalam pengungkapan pentingnya *Environmental, Social, and Governance (ESG)*.

Teori Keagenan

Menurut teori keagenan, manajemen bertindak sebagai agen dan pemilik perusahaan bertindak sebagai prinsipal. Perbedaan tujuan ini menyebabkan konflik keagenan, yang membutuhkan mekanisme pengendalian seperti tata kelola perusahaan. Menurut (Tabun dan Machdar, 2025) tata kelola perusahaan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan keberlanjutan dan lingkungan perusahaan diterapkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Ini terutama terlihat ketika kebijakan pajak karbon diterapkan, di mana manajemen perusahaan dapat memoderasi kebijakan tersebut untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis.

Menurut (Pradipta dan Syafruddin, 2024), konflik keagenan dapat memengaruhi pengungkapan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, terutama ketika manajemen berusaha meningkatkan citra perusahaan. Untuk memastikan bahwa kualitas pengungkapan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* tidak bias dan tetap mencerminkan keadaan sebenarnya, diperlukan tata kelola perusahaan yang kuat. Teori keagenan juga relevan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme tata kelola yang efektif dapat memengaruhi pilihan investasi keberlanjutan berdasarkan intensitas aset tetap.

Pajak Karbon (X1)

Pajak Karbon adalah instrumen kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong penggunaan energi yang lebih bersih. Tujuan dari pajak karbon adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendorong bisnis untuk mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan (Sitinjak, 2025). Perusahaan yang dikenakan pajak karbon diberi insentif untuk meningkatkan efisiensi energi mereka untuk mengurangi beban fiskal, sehingga kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak karbon. Sebagaimana ditunjukkan oleh (Sadewo *et al*., 2025), pajak karbon di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap kesiapan bisnis untuk berpartisipasi dalam green economy. Sebagaimana diuraikan, pajak karbon memengaruhi upaya transisi energi berkelanjutan.

Intensitas Aset Tetap (X2)

Intensitas aset tetap menunjukkan seberapa bergantungnya sebuah perusahaan pada aset berwujud seperti mesin, pabrik, dan peralatan yang dapat menghasilkan emisi. Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola dampak lingkungan dari operasinya (Putri *et al*., 2025). Hal ini mendorong bisnis untuk menerapkan kebijakan efisiensi energi dan mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

(Palupi *et al.*, 2023). Ini menunjukkan bahwa tingkat aset tetap berkorelasi dengan konsumsi bahan bakar fosil dan emisi karbon, sehingga perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung memperkuat praktik *Environmental, Social, and Governance (ESG)* untuk mempertahankan legitimasi dan peraturan.

***Green economy* (X3)**

Green economy adalah pendekatan pembangunan yang menekankan keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan pengurangan emisi (T, 2024). Perusahaan yang mengadopsi prinsip ini cenderung mengubah prosedur operasi mereka untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan meningkatkan efisiensi produksi. (Lolo et al, 2022) dari sudut pandang perbankan syariah, green economy mendorong perusahaan untuk mencapai kinerja lingkungan dan sosial sebagai bagian dari implementasi keberlanjutan. Oleh karena itu, green economy memiliki peran yang signifikan dalam mendorong peningkatan kinerja *Environmental, Social, and Governance (ESG)*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang hubungan konseptual antara pajak karbon, intensitas aset tetap, *green economy*, dan tata kelola perusahaan sebagai bagian dari praktik keberlanjutan organisasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran kontekstual dan holistik tentang bagaimana perusahaan menanggapi kebijakan lingkungan dan mengelola aset, *green economy*, dan sebagainya. Berbagai studi keberlanjutan berfokus pada pemahaman mendalam tentang praktik pengelolaan perusahaan dan proses penerapan kebijakan lingkungan (T, 2024). Analisis dokumen seperti laporan keberlanjutan, laporan tahunan, pedoman tata kelola perusahaan, publikasi kebijakan pajak karbon, dan laporan implementasi *green economy* membantu mendapatkan data penelitian. Dokumen ini dipilih karena mengandung informasi yang relevan tentang bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungannya, bagaimana operasinya mendukung aset fisiknya, dan bagaimana perusahaan menerapkan prinsip *green economy* dalam operasinya. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan dan dokumen kebijakan sangat penting untuk menilai praktik tata kelola organisasi, strategi *green economy*, dan implementasi pajak karbon (Sitinjak, 2025). Selain itu, penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti menemukan pola kebijakan dan praktik bisnis tanpa mengganggu objek penelitian.

Analisis isi dan analisis tematik digunakan untuk melakukan analisis data. Analisis isi digunakan untuk memeriksa secara sistematis sejarah kebijakan perusahaan tentang hal-hal seperti bagaimana perusahaan menangani kewajiban pajak karbon, rencana pengelolaan aset tetap, dan upaya untuk menerapkan *green economy*. Kepatuhan lingkungan, transparansi tata kelola, efisiensi energi, dan manajemen risiko operasional adalah semua kategori penting yang dapat diidentifikasi melalui teknik ini. Selain itu, analisis tematik digunakan untuk menemukan tema penting yang muncul berulang kali dalam dokumen. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian yang menyelidiki bagaimana perilaku organisasi, strategi operasional, dan kebijakan fiskal berkorelasi dengan masalah keberlanjutan (Tabun dan Machdar, 2025).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pajak karbon sangat penting untuk mendorong keberlanjutan bisnis dan ekonomi secara keseluruhan. (Sitinjak, 2025) menyatakan bahwa pajak karbon akan paling efektif jika diterapkan secara menyeluruh dan konsisten karena ada korelasi positif antara keberadaan kebijakan karbon dan kinerja lingkungan, sosial, dan pemerintahan aset tetap yang besar cenderung memperkuat praktik *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Dengan kata lain, semakin banyak instrumen fiskal dan regulasi berbasis karbon yang diterapkan, semakin banyak perusahaan yang termotivasi untuk meningkatkan praktik keberlanjutan dan tata kelola lingkungan mereka. Sebaliknya, telah terbukti bahwa tanggapan bisnis terhadap kebijakan keberlanjutan dipengaruhi oleh tingkat aset tetap (Putri *et al.*, 2025).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

(T, 2024) perusahaan yang memiliki tingkat intensitas aset yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan dan kebutuhan yang lebih besar untuk melakukan investasi lingkungan seperti efisiensi energi, teknologi rendah emisi, dan modernisasi fasilitas produksi. Hal ini berdampak pada pengelolaan aset fisik perusahaan serta meningkatkan praktik *Environmental, Social, and Governance (ESG)* secara keseluruhan.

Selain itu, gagasan *green economy* membantu membangun lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Pendekatan *green economy* mendorong bisnis untuk memasukkan prinsip-prinsip lingkungan ke dalam rencana mereka untuk masa depan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Perusahaan dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi sambil memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas lingkungan jika mereka menerapkan lingkungan bisnis yang selaras dengan prinsip *green economy* ini. Secara keseluruhan, tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan sangat penting untuk menerapkan kebijakan lingkungan seperti pajak karbon dan inisiatif *green economy*. Dengan demikian, penelitian terdahulu secara konsisten menegaskan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal berbasis karbon, karakteristik aset perusahaan, dan komitmen terhadap *green economy* adalah fondasi penterjemahan yang baik. Struktur tata kelola yang baik akan mendorong perusahaan untuk lebih disiplin dalam menerapkan strategi keberlanjutan, meningkatkan kualitas pelaporan lingkungan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan memberikan dampak positif bagi kinerja *Environmental, Social, and Governance (ESG)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain penelitian mencakup rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pertanyaan penelitian. Ini mencakup langkah-langkah, metode, teknik, dan strategi yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian dapat dirancang dengan berbagai cara tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan, seperti penelitian kualitatif, eksperimental, survei, atau observasional (Machdar dan Manurung, 2025). Proses pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dikenal sebagai desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatori. Keputusan tentang strategi penelitian (misalnya, eksperimen, survei, studi kasus), tingkat pengendalian dan manipulasi penelitian (misalnya, tingkat campur tangan peneliti), lokasi, tingkat data yang akan dianalisis, dan aspek temporal (cakrawala waktu) sangat penting (Machdar dan Manurung, 2025). Penelitian sebelumnya di bidang pajak karbon, intensitas asset tetap, *green economy, Environmental, social, and Governance (ESG)* sejalan dengan pilihan pendekatan ini.

(Putri *et al*., 2025)menggunakan desain eksplanatori karena berfokus pada bagaimana faktor keberlanjutan mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa model analisis kausal yang terukur biasanya diperlukan untuk menjelaskan bagaimana variabel kuantitatif keberlanjutan berinteraksi satu sama lain. (T, 2024), penelitian sistematis tentang hubungan antara laporan keberlanjutan, *green economy*, dan pajak karbon untuk mendukung SDGs semakin mendukung pendekatan eksplanatori ini. Hasil tinjauan tersebut menunjukkan bahwa komponen keberlanjutan cenderung saling memengaruhi secara struktural, jadi analisis hubungan kausal sangat penting. *Corporate governance* sering memengaruhi keberhasilan pelaporan keberlanjutan dan kebijakan lingkungan (Tabun dan Machdar, 2025).

Dalam penelitian keberlanjutan dan nilai perusahaan, variabel dependen biasanya dikaitkan dengan indikator yang menunjukkan performa ekonomi atau keberlanjutan perusahaan (Putri *et al*., 2025). Untuk mengukur variabel dependen, regresi linear dapat digunakan. Mereka yang melakukan penelitian menggunakan metrik seperti indeks keberlanjutan. untuk menilai pengaruh variabel independen, lebih mudah untuk melihat nilai

perusahaan atau performa fiskal (Pradipta dan Syafruddin, 2024). Variabel dependen dalam penelitian tentang tata kelola perusahaan dan lingkungan, sosial, dan pemerintahan Environmental, Social, and Governance (ESG) harus memiliki indikator yang terstandarisasi dan objektif. Variabel bebas juga disebut sebagai variabel prediktor, stimulus, eksogen, atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel tidak bebas dan biasanya memiliki nilai di luar model. Variabel yang dikaitkan dengan variabel dependen disebut variabel indepe. (Tabun dan Machdar, 2025) menyatakan Dalam penelitian keberlanjutan, faktor independen seperti laporan keberlanjutan, akuntansi hijau, dan tata kelola perusahaan berfungsi sebagai prediktor utama. Untuk dapat dianalisis secara empiris, variabel independen harus memiliki petunjuk yang dapat diandalkan. Misalnya, pajak karbon dapat dihitung dengan tarif atau nilai emisi, sedangkan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dapat dihitung dengan skor pengungkapan perusahaan. (Sitinjak, 2025) variabel independen dalam penelitian kebijakan pajak karbon menunjukkan unsur-unsur kebijakan fiskal dan *green economy*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menunjukkan bahwa pajak karbon sangat membantu bisnis meningkatkan efisiensi energi dan adopsi teknologi ramah lingkungan. Karena perusahaan yang memiliki banyak aset fisik menghadapi kebutuhan yang lebih besar untuk investasi dalam teknologi hijau dan pengelolaan lingkungan, intensitas aset tetap memengaruhi praktik keberlanjutan. Selain itu, telah terbukti bahwa penerapan ekonomi hijau mendukung kinerja *Environmental, Social, and Governance (ESG)* melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan pengelolaan limbah. Melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif terhadap kebijakan keberlanjutan, tata kelola perusahaan berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, kebijakan fiskal berbasis lingkungan, struktur operasional perusahaan, dan strategi bisnis berkelanjutan harus bekerja sama.

Pemerintah harus memperkuat regulasi pajak karbon dan memberikan insentif untuk mendorong lebih banyak perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan diharapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola mereka sehingga implementasi kebijakan lingkungan dapat dilakukan secara efisien dan transparan. Untuk mengumpulkan data yang lebih akurat mengenai pengaruh variabel pajak karbon, intensitas aset tetap, dan ekonomi hijau terhadap kinerja *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, peneliti masa depan dapat menggunakan metode kualitatif atau campuran. Selain itu, pemangku kepentingan diharapkan mendorong penerapan prinsip ekonomi hijau secara konsisten dalam operasional perusahaan sebagai upaya jangka panjang untuk mengatasi masalah keberlanjutan dan emisi karbon di seluruh dunia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebsar-besarnya kepada Ibu dosen pembimbing Nera Marinda Machdar, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua dosen Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas pengetahuan dan pengetahuan yang mereka berikan. Penulis juga berterima kasih kepada orang tua dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan, mendukung, dan dorongan motivasi dari mereka. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memberikan data, informasi,

serta dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

Lawrence Daniel Ferwinz Andi Lolo, Achmad Dhani Maulana, dan Decmonth Nuel Pasaribu, (2022). Transparansi Pajak Karbon: Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. *Jurist-Diction*, *5*(1), 205–228. https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32981

Machdar dan Manurung. (2025). *Metode Riset Akuntansi*. PT.Adler Manurung Press, 282-284

Pradita Galih Sekar Palupi, Masruri Muchtar, Pardomuan Robinson Sihombing. (2023). *Pengaruh pajak karbon, penggunaan bahan bakar fosil, dan pertumbuhan pdb terhadap emisi karbon*. *3*(2), 119–127.

Muhammad Rifan Taqi Pradipta & Muchammad Syafruddin. (2024). Pengaruh Environmental, Social, Governance Disclosure Terhadap Nilal Perusahaan Dengan Audit Quality Sebagai Variabel Moderasi *(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks KOMPAS 100 Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)*. *13*(4), 1–14.

Mia Helmalia Putri, Ricky Yunisar Setiawan & Agus Satrya Wibiwo. (2025). Dampak ESG, Green Accounting, dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan Studi Kasus Pasa Sektor Energi yang Terdaftar di BEI (2021-2023). 3(1), 44-54

Sadewo, B., Millenium, E. S., & Haryanda, W. A. (2025). Penerapan kebijakan pajak karbon di Indonesia. *E-Jurnal Sumberdaya Dan Lingkungan Vol.14. No.1, Januari-April 2025 ISSN: 2303-1220 (Print)*, *14*(1), 41–48.

Panghutan Sitinjak. (2025). *Penerapan Pajak Karbon Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Potensi Pendapatan Negara dan Melaui Ekonomi Hijau di Indonesia*. *06*(09), 4466–4473.

Dian Valentina T. (2024). Carbon Tax, Green Bonds, and Sustainability Reports to Support the 2030 Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review Pajak Karbon, Green Bonds, dan Laporan Keberlanjutan untuk Mendukung Sustainability Development Goals 2030: Tinjauan Lite. J*urnal Akuntansi dan Keunagan Universitas Jambi, 9(3), 163-171*. https://doi.org/10.22437/jaku.v9i3.39393

Gresella Nurlina Tabun & Nera Marinda Machdar. (2025). Tata Kelola Perusahaan Memoderasi Pajak Karbon, Green Funds dan Sustainability terhadap Keberlanjutan Fiskal di Era Transisi Energi Sub Sektor Perusahaan Energi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipline*, *01*(04), 1343–1351.
https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/535%0Ahttps://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/download/535/373

Oktavianda Riyanti Puteri, Arie Setyo Dwi Purnomo. Penerapan Green Economy di Indonesia: Literatur Riview. Jurnal Management Studies,Vol.18, No.1, April 2024 ISSN:2541 (Online) dan ISSN: 1907 4824 (Print)